

ABSTRAK

Bonita Alfa Ferrari Putri (0910 611 004), Implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Bogor). Dibawah bimbingan Hendrawati Yuripersana, SH, MH, M.Kn.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan studi kasus di wilayah Kabupaten Bogor. Kedudukan tanah yang begitu penting bagi masyarakat menimbulkan kepincangan dalam pola struktur pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya tanah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial akan tanah tersebut mengalami ketimpangan. Ketimpangan ini menimbulkan suatu kebijakan mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian baik oleh individu maupun badan hukum. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai implementasi pembatasan kepemilikan tanah dikantor pertanahan khususnya wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta hambatan yang terjadi selama melaksanakan ketentuan ini. Penetapan Luas Tanah Pertanian bagi seseorang yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah pertanian, bangunan dan benda-benda yang terkait dengan tanah. Kewenangan dari kantor pertanahan wilayah Kabupaten Bogor hanya sebatas melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut. Namun seiring perkembangan zaman dan keadaan wilayah maupun keadaan penduduk, program pembatasan kepemilikan tanah pertanian ini sudah tidak begitu berjalan dengan baik dikarenakan berbagai macam faktor. Hambatan yang timbul selama pelaksanaan ini tidak hanya dari faktor luar kantor pertanahan Kabupaten Bogor, tetapi juga terdapat faktor hambatan dari dalam kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendata tanah pertanian yang ada, masyarakat yang masih tidak mau melepaskan tanah pertaniannya yang melebihi batas maksimum, faktor ekonomi dari masyarakat yang memilih menjual tanah pertaniannya, adanya pemodal-pemodal besar yang membeli tanah pertanian untuk dibangun menjadi perumahan, tanah-tanah yang ada lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya untuk memiliki tanah tersebut, serta perubahan zaman yang semakin berkembang, sehingga pola pikir masyarakat juga ikut berkembang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat empiris.

Kata Kunci : Pembatasan, Kepemilikan Tanah, Tanah Pertanian

ABSTRACT

Bonita Alfa Ferrari Putri (0910 611 006). Implementation of Law No. 56 Prp Determination 1960 on Agricultural Land (Case Studies in Bogor District). Under the guidance of Hendrawati Yuripersana, SH, MH, M.Kn.

ABSTRACT

This research was conducted to get an overview of the implementation of Law No. 56 Year 1960 on Determination Prp Land Farms with a case study in Bogor regency. Position the land that is so important for the community cause imbalance in the pattern of land ownership and control structure, especially farmland. This suggests that the social function of the land will experience inequality. This disparity raises a policy regarding restrictions on ownership of agricultural land by both individuals and legal entities. therefore needs to be known about the implementation of restrictions on land ownership in particular land office Bogor regency under Law No. 56 (Prp) Determination 1960 on Agricultural Land and obstacles that occur during the performance of this provision. Determination of Agricultural Land for someone who has exceeded the maximum farm is done by waiver of agricultural land, buildings, and objects associated with the land. The authority of the district land office Bogor merely measuring and titling of the land. However, over the time and circumstances of the region and to the residents, the program's restrictions on ownership of agricultural land is not so run well for a variety of factors. Obstacles that arise during the implementation not only of the external factors Bogor District land office, but there is also a resistance factor of the Bogor district land office. Barriers include lack of Human Resources to assess existing agricultural land, the people who do not want to give up his farm that exceeds the maximum limit, the economic factors of the community who choose to sell his farm, the investors-large investors who bought the farm for built into housing estates there are more dominated by people who rely on its power to own land, as well as changes in the growing time, so that the public mindset also changes. In this study using an empirical approach.

Keywords: Restriction, Ownership of Land, Farmland